

## 16 Ribu PNS Laporkan Kekayaan

**SEMARANG** - Per awal September 2017, lebih dari 16 ribu PNS Pemprov Jateng telah melaporkan harta kekayaan. Sebanyak 1.716 pejabat struktural meliputi eselon I-IV dan gubernur serta wakil gubernur membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Adapun PNS nonstruktural sebanyak lebih dari 15 ribu orang telah membuat laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN). Sementara itu, dari 100 anggota DPRD Jateng, masih empat orang yang belum mengirim LHKPN.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, pembuatan dan pelaporan harta kekayaan itu merupakan langkah penting untuk

mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Hal itu juga menjadi bagian dari revolusi mental birokrat yang selama ini diprioritaskan. Reformasi birokrasi juga menjadi prioritas dalam setahun terakhir periode jabatannya.

"Saya selalu mengingatkan agar membuat laporan (LHKPN dan LHKASN)," kata Ganjar pada acara Mas Ganjar Menyapa di Puri Gedeh Semarang, baru-baru ini.

Ia meminta agar kasus tangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha menjadi cermin bagi para pejabat daerah dan jajarannya agar tak terulang. Apalagi sebelumnya hal yang sama terjadi di Kebumen dan Klaten.

Ganjar menyebut praktik korupsi itu seperti seseorang yang bermain api.

"Kalau sudah tahu panas, mengapa masih diulangi? Itu kan sama saja dengan *ndableg*," ujarnya.

Dalam kesempatan itu dosen FISIP Undip Teguh Yuwono mengatakan, untuk menjauhkan pejabat dari praktik-praktik korupsi, diperlukan integritas. Membangun integritas setidaknya butuh dua hal.

Pertama, pejabat yang teruji mematuhi sumpah jabatan meski ada kesempatan untuk menyelewengkan kewenangan. Kedua, tetap mampu melakukan tugas dan kewajibannya sesuai aturan.

Teguh mengapresiasi langkah Ganjar dalam mendorong pembuatan LHKPN dan LHKASN. Hal itu dinilainya sebagai salah satu langkah pencegahan tindak pidana korupsi. (H81-18)